

**HUBUNGAN DINAMIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015-2018**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi

Peminatan:

Akuntansi Sektor Publik



Diajukan Oleh :

SRI REJEKI

NIM. 1322100752

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
NOVEMBER 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**HUBUNGAN DINAMIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018**

Diajukan Oleh :

SRI REJEKI

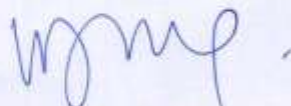
NIM. 1322100752

Telah disetujui pembimbing

Pada tanggal : *17 November 2020*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



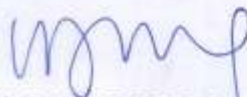
Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001



Tri Utami, S.E., M.Sc.
NIDN. 0610108901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

HALAMAN PENGESAHAN


**HUBUNGAN DINAMIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, SISA LEBIH
PEMBIAYAAN ANGGARAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2018**

Diajukan Oleh :

SRI REJEKI

NIM. 1322100752

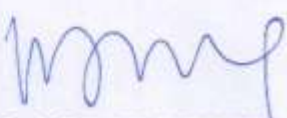
Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma dan diterima untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada tanggal : *02 Desember 2020*



Ketua

Dr. Sutrisno Badri, S.E., M.Sc.
NIDN. 0207055601

Anggota



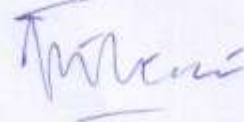
Agung N. Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA.
NIDN. 0620017001

Sekretaris



Titik Purwanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0605127603

Anggota



Tri Utami, S.E., M.Sc.
NIDN. 0610108901



Disahkan
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Sutrisno Badri, S.E., M.Sc.
NIDN. 0207055601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sri Rejeki
NIM : 1322100752
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Hubungan Dinamis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018”** adalah hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dilain waktu terbukti ada penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana perlunya.

Klaten, November 2020

Yang membuat pernyataan,



Sri Rejeki

HALAMAN MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS Alinsyirah ayat 6)

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.

(Lenang Manggala)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri.

(QS Ar Ra'd 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Suami tercinta Santoso dan putera tersayang Razka Maulana Sakhi yang selalu memberikan semangat tiada henti
2. Bapak Kliwon dan Ibu Tukinem serta Bapak Warno dan Ibu Giyem selaku orang tua yang mendoakan, membimbing dan menyemangati tiap hari.
3. Kakak-kakaku tersayang beserta keponakan yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, hiburan dan kasih sayang.
4. Sahabat peneliti yaitu annisa yoantari, puput, lista, nopek yang selalu mensupport dan mendoakan.
5. Diri sendiri yang sudah berjuang sampai sekarang.
6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2013 terimakasih untuk support dan bantuannya.
7. Almamaterku, Universitas Widya Dharma Klaten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini karena peneliti menyadari tanpa ridho dan bimbingan-Nya segala sesuatu tidak dapat terwujud. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma, adapun judul dari skripsi ini adalah “Hubungan Dinamis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Jumlah Penduduk, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018”.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Bapak Agung N Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran yang membangun selama penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Tri Utami, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan sabar memberikan bimbingan arahan, kritik dan saran yang membangun selama penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten dan khususnya Program Studi Akuntansi atas bantuan yang telah diberikan selama ini.
6. Untuk suami tercinta Santoso dan putera tersayang Razka Maulana Sakhi yang selalu mendampingi, menjadi penyemangat, memberikan yang terbaik untuk peneliti serta doa yang tak pernah putus asa.
7. Kedua orang tua peneliti yang sangat dicintai dan disayangi, Bapak Kliwon dan Ibu Tukinem serta Bapak Warno dan Ibu Giyem yang tak henti-hentinya mendoakan.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2013 terimakasih sudah mensupport.
9. Sahabat-sahabat spesial Annisa Yoantari dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Klaten, Oktober 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. LANDASAN TEORI	15
B. KERANGKA BERFIKIR	26
C. HIPOTESIS PENELITIAN	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. RUANG LINGKUP PENELITIAN	33
B. POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL	33
C. JENIS DAN SUMBER DATA.....	34
D. METODE PENGUMPULAN DATA	34
E. VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURAN	35
F. METODE ANALISIS DATA	38
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. DATA PENELITIAN.....	44
B. ANALISIS DATA.....	46
C. PEMBAHASAN	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja daerah dan Belanja Modal	4
Tabel 2.1 DAU dan DAK Provinsi Jawa Tengah 2015-2018.....	6
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	44
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4.5 <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Hasil Uji Deskriptif

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas

Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis

ABSTRAK

Sri Rejeki, 1322100752, 2020. “Hubungan Dinamis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018”

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, dana alokasi umum terhadap belanja modal, dana alokasi khusus terhadap belanja modal, sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal, jumlah penduduk terhadap belanja modal, dan pertumbuhan domestik regional bruto terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018.

Sumber data penelitian yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, maupun sumber data sekunder lainnya. Data berupa data *time series* Tahun 2015 hingga Tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan sampel sebanyak 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum, SILPA, Pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: pendapatan, dana alokasi, pembiayaan, pertumbuhan ekonomi belanja modal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada pengelolaan pembangunan dan perekonomian daerah setelah Orde Baru tidak berkuasa lagi di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat berpengaruh pada seluruh pola kehidupan baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi di Indonesia. Bidang aspek politik dapat dilihat dengan semakin kuatnya keuangan daerah untuk menentukan berbagai kebijakan di daerah; aspek sosial dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin menurun selama era reformasi; dan aspek ekonomi dapat ditandai dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan dana fiskal kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan ataupun operasional daerah. Ketiga hal tersebut merupakan implementasi dari dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang Otonomi Daerah atau Desentralisasi Daerah yang kemudian direvisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu wujud nyata dalam era reformasi yang sangat mengharapkan adanya suatu tatanan atau pengelolaan pada pemerintah yang baik. Pengelolaan tersebut diwujudkan dalam tata kelola keuangan yang baik terutama pada sektor publik yang mengedapankan transparansi,

akuntabilitas serta ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam menggunakan anggaran. Transparansi didasarkan pada kebebasan informasi yang diperoleh publik secara langsung agar mereka mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah.

Menurut teori keagenan, akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen dalam memberikan laporan pertanggungjawaban dengan menyajikan, melaporkan, dan menjelaskan apa saja aktivitas serta kegiatan yang sudah dilakukan kepada pemerintah pusat yang mempunyai hak, kewajiban, dan kewenangan untuk meminta laporan pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan untuk *value for money* lebih mengedepankan konsep pada tata kelola lembaga di sektor publik berdasarkan pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan secara penuh dalam mengurus rumah tangganya dan mempunyai hak untuk mempergunakan sumber-sumber pendapatan keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari keluhan masyarakat di daerahnya. Adanya pemberian otonomi daerah akan berdampak pada pembangunan suatu daerah karena dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam membuat rencana keuangan dan kebijakannya demi kemajuan daerah (Afifanda, 2016). Tujuan dari kewenangan adalah untuk lebih kepada pendekatan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau maupun mengontrol penggunaan dana tersebut.

Pembangunan daerah merupakan wujud nyata dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Pembangunan daerah tidak akan terwujud jika tidak ada pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana ini dapat direalisasikan jika perencanaannya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terutama dalam bagian belanja, khususnya belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Belanja daerah merupakan akumulasi dari seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum daerah dengan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang sama dan tidak akan mendapatkan pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah (Siregar, 2015). Belanja daerah ini terdiri dari belanja tidak langsung serta belanja langsung dimana belanja tidak langsung merupakan belanja yang dialokasikan tidak berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan maupun program kegiatan dan aktivitasnya. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan program kegiatan dan aktivitasnya dimana dalam belanja langsung terdapat belanja modal. Belanja modal adalah pengalokasian anggaran untuk mendapatkan

aset tetap dengan tujuan memberikan manfaat lebih dari satu periode (Halim, 2014).

Pengalokasian ke dalam anggaran belanja modal tersebut merupakan suatu proses yang memiliki sarat kepentingan politis dimana anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik terutama dalam bidang saran dan prasarana umum yang disediakan pemerintah daerah. Adanya muatan politis dalam pembuatan rencana APBD dari lembaga legislatif yang terlibat dalam menyusun anggaran menyebabkan adanya alokasi anggaran belanja modal yang terdistorsi dan tidak efektif dalam penyelesaian masalah di dalam masyarakat (Samodra, 2016).

Pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, realisasi anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebesar Rp. 17,820 Triliun meningkat menjadi Rp. 24,478 Triliun pada 2018. Peningkatan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah justru membuat belanja modal provinsi menurun tahun 2015 sebesar Rp. 2.514 Triliun menjadi Rp. 1.681 Triliun atau turun sebesar Rp. 833 Milliar dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Belanja Daerah dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah 2015-2018 (Triliun Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Modal
2015	17.82	2.514
2016	19.354	2.815
2017	22.884	1.454
2018	24.478	1.681

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 833 Milliar. Penurunan tersebut terjadi karena alokasi anggaran belanja modal tidak efektif ataupun tidak tepat sasaran sehingga permasalahan yang ada di dalam masyarakat tidak terselesaikan. Besarnya alokasi pada belanja modal terutama dalam bentuk aset tetap seperti peralatan, tanah, dan infrastruktur sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Produktivitas tersebut dapat membawa pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah juga mempunyai beberapa komponen yaitu penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Siregar (2015) PAD merupakan penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan dan ketetapan daerah. Sektor pendapatan daerah sangat memegang peranan penting karena dapat melihat seberapa besar suatu daerah dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah. Selain itu, PAD juga dapat menjadi modal utama dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan karena sumber penerimaan menjadi kewenangan daerah beserta tata cara pengelolaannya.

Dana perimbangan terdapat dua alokasi anggaran yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dimana dana alokasi umum (DAU) berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan khusus ke daerah yang mempunyai tujuan pemerataan kemampuan finansial pada setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Desentralisasi Daerah. Dana alokasi umum merupakan faktor penting dalam pembiayaan APBD dimana sebagian besar pengalokasiannya terserap untuk belanja pegawai dan belanja untuk proyek pembangunan, dalam hal ini sarana dan prasarana. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dimana pengalokasiannya dilakukan oleh kepala daerah yang bertujuan untuk membantu dalam mendanai kegiatan khusus yang menjadi wewenang daerah dan sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Tabel 2. DAU dan DAK Provinsi Jawa Tengah 2015 - 2018 (Juta Rupiah)

Tahun	DAU	DAK
2015	1,629,429.00	57,973.00
2016	1,859,907.22	5,263,717.15
2017	3,652,586.00	6,566,890.00
2018	3,652,586.00	6,511,740.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa DAU Jawa Tengah lebih rendah dari DAK dari tahun 2015 – 2018. Dengan demikian, selama 4 tahun tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih banyak menganggarkan pada kegiatan pendidikan, kesehatan, program keluarga bencana, jembatan dan infrastruktur jalan, infrastruktur air minum, sanitasi,

dan irigasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian, serta perikanan dan kelautan dimana seluruh faktor tersebut merupakan bagian dari belanja modal dan pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diperoleh untuk kegiatan yang bersifat fisik. Pengeluaran tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 dimana DAK dipergunakan untuk membiayai investasi penggandaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik yang mempunyai unsur ekonomis. DAK dapat membantu dalam pembiayaan operasional dan pemeliharaan pada prasarana dan sarana tertentu dengan periode tidak melebihi tiga tahun.

Sumber pendapatan lainnya selain PAD, DAU, dan DAK dalam pengalokasian belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, SILPA merupakan sisa uang atau dana yang didapat dari nilai aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode (Putra, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 SILPA merupakan selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jumlah SILPA idealnya ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pada program atau kegiatan pemerintah daerah baik kota/kabupaten maupun provinsi yang nantinya akan menunjukkan seberapa besar efisiensi program atau kegiatan tersebut.

Penggunaan SILPA dapat menjadi pro dan kontra dimana mereka yang pro, setuju jika SILPA masuk ke dalam pengalokasian belanja modal sedangkan yang kontra, SILPA lebih baik digunakan pada belanja modal karena pada kenyataannya, sebagian besar SILPA disumbangkan ke bagian belanja langsung berupa belanja modal yang langsung menyentuh atau mengakomodir kebutuhan masyarakat (Putra, 2017). Ardhini dan Handayani (2011) tidak sependapat dengan pernyataan tersebut dimana menurutnya, SILPA digunakan untuk permasalahan yang krusial atau tidak terduga seperti bencana alam dimana penggunaan SILPA tersebut sudah disetujui oleh anggota legislatif di tahun sebelumnya. SILPA yang besar mengindikasikan bahwa eksekutif di daerah lemah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan. Permasalahan moral tersebut sebenarnya patut dipertanyakan karena perlu adanya kejelasan dan transparansi dalam penggunaannya untuk belanja publik atau pegawai negara.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi besar kecilnya belanja modal suatu daerah adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk turut memberikan peran yang penting dalam tinggi rendahnya belanja modal suatu daerah. Jika daerah memiliki jumlah penduduk yang besar maka bagi pemerintah daerah terutama para perancang pembangunan dipandang sebagai awal dari modal aset pembangunan namun bisa diartikan sebagai beban pembangunan. Dikatakan sebagai beban pembangunan jika struktur pada belanja daerah rendah serta persebaran pada mutu atau kualitas tidak sesuai sehingga banyak menuntut pada pelayanan sosial dan menyebabkan

tingkat produksi yang rendah dan akan menjadi beban pajak yang dihasilkan dari pajak tenaga kerja aktif (Sari dan Ningsih, 2018). Sedangkan dikatakan sebagai aset modal dasar dilihat dari meningkatnya kualitas dan keahlian atau keterampilan yang dapat meningkatkan produksi daerah (Devita, dkk, 2014).

Produksi daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah atau biasa yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkat dan membawa perekonomian nasional membaik (Sari dan Ningsih, 2018). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi besar kecilnya belanja modal daerah. Sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur maka belanja modal pun dapat meningkat dan memenuhi pada pengadaan sarana dan prasarana sektor publik terutama melalui divisi keuangan daerah serta perencanaan pembangunan daerah. Dengan wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah dapat menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah yang mengacu pada azas kepatuhan serta kebutuhan daerah dimana sudah tertera dalam anggaran daerah (Farel, 2015).

Wewenang yang besar pada daerah dalam mengurus daerahnya memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah untuk mandiri terutama dalam merencanakan keuangan daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam mengatur pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dapat meningkat

dalam membangun daerahnya (Fuad, dkk, 2017). Pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan dapat membentuk pola kemitraan dengan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja baru untuk mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah melalui rencana keuangan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik (Astuti dan Astika, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fajrina dan Suzan (2015) yang meneliti di Bogor hanya terdapat variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU. Pada penelitian ini PAD berpengaruh negatif, artinya PAD justru mengurangi pada belanja modal karena PDRB Bogor tidak dapat mendukung penambahan pada belanja modal. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Napitu, dkk (2018) yang meneliti di Provinsi Jawa Barat dengan variabel DAU, DAK, dan SILPA menunjukkan pada ketidakmampunya SILPA dalam menambah belanja modal karena sebagian besar dapat disumbangkan pada belanja operasional. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mentayani dan Rusmanto (2013) di Kalimantan juga dengan variabel DAU, PAD, dan SILPA menunjukkan bahwa DAU dan PAD tidak dapat mengangkat belanja modal daerah karena terlalu banyak pemanfaatannya pada belanja operasional dan keterbatasannya kemampuan daerah dalam mengeksplorasi kekayaan alam.

Pada penelitian yang menggunakan variabel jumlah penduduk terdapat perbedaan terutama dari hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kenyataan yang ada dan teori keagenan. Seperti yang dilakukan oleh Devita, dkk (2014) dengan penelitian di Jambi dan Amalina (2017) yang meneliti di Sumatera Barat dan Riau menemukan bahwa jumlah penduduk berhubungan negatif. Hal ini dikarenakan Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Riau masih sangat tergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang digunakan untuk meningkatkan belanja langsung. Dengan kata lain, peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah sehingga menjadi beban bagi pemerintah Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Riau.

Hasil yang sama juga ditemukan oleh Afifanda (2016) yang meneliti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y.) dan Jawa Tengah yang menemukan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Menurut Afifanda (2016), hal tersebut dapat terjadi karena dari tahun 2013 hingga 2015 pemerintah Provinsi D.I.Y. dan Jawa Tengah tidak membangun sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur lainnya untuk kepentingan masyarakat sehingga pemerintah daerah di kedua provinsi tidak mengeluarkan anggaran untuk penambahan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur.

Melihat kondisi tersebut, tentu sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Jawa Tengah dimana saat ini pemerintah provinsi sangat gencar meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata, UMKM, investasi

baik domestik maupun asing, serta peningkatan infrastruktur yang saat ini sedang dibangun jalan tol. Peningkatan pendapatan tersebut dapat melebihi dari peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membangun daerah di Provinsi Jawa Tengah masih sangat besar terutama proyek yang difokuskan pada daerah terpencil di Provinsi Jawa Tengah. Dana tersebut diperuntukkan penambahan dan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Uraian pada latar belakang dan perbedaan penelitian sebelumnya tersebut maka penelitian ini layak untuk dilakukan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: **HUBUNGAN DINAMIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA), JUMLAH PENDUDUK, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 – 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ini.

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal?
5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal?
6. Apakah Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.
3. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal.
4. Untuk menguji pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal.
5. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal.
6. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Domestik Regional Bruto terhadap belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan referensi atau kajian bagi peneliti lain yang akan membahas atau mengangkat isu yang ada dalam penelitian ini serta memberikan kontribusi bagi pengembangan yang berkaitan dengan kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan atau informasi bagi pemerintah daerah terutama pada bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis yang khusus dalam pengalokasian belanja modal di setiap provinsi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik demi kemajuan daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Hal ini tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$).
2. Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,864 > 0,05$).
3. Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$).
4. SILPA tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,242 > 0,05$).
5. Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,049 < 0,05$).

6. Pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,361 < 0,05$)

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mendorong kepada kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk lebih efisien dalam menggunakan dana alokasi umum, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan yang positif dan sejalan dengan hal tersebut dapat meningkatkan belanja modal dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga harus mempertahankan pendapatan asli daerah dari kabupaten/kota di Jawa Tengah, karena melalui penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil kekayaan daerah agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil kekayaan alam maupun pengelolaan pajak daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk belanja modal sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memanfaatkan PAD, DAU, dan DAK dengan efisien dan efektif untuk meningkatkan pembangunan

infrastruktur serta sarana dan prasarana publik yang lebih baik dan memadai melalui belanja modal. Hal ini dikarenakan peningkatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mensejahterakan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Selain itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini dengan melihat kemungkinan lain di provinsi lainnya, sehingga *insight* dan kebermanfaatan yang diperoleh dapat lebih berdampak terhadap provinsi lainnya. Disisi lain, penelitian dimasa depan juga dapat mempertimbangkan variabel variabel lain yang berpengaruh terhadap belanja modal namun tidak digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., dan Sari, D. (2016). Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Anggaran Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 5(2). 68-78.
- Afifanda, D. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Amalina, R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Jumlah Penduduk, PAD, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal: Studi Komparatif Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan Riau. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Ardhini., dan Handayani (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).
- Astuti, I.A.P., dan Astika, I.B.P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 17(3). 2416-2446.
- Ayem, S., dan Pratama, D.D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011 – 2016. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 2(2), 169-182.
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Devita, A., Delis, A., dan Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2(2), 63-70.
- Fajrina, M.N., dan Suzan, L. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2009 – 2013). *e-Proceeding of Management*, Vol. 2(3), 3101-3108.

- Farel, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Signifikan*, Vol. 4(2), 189-210.
- Fitriana, N., dan Sudarti, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2(2), 332-345.
- Fuad, S.I., Mire, M.S., dan Effendi, A.S. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belanja Pembangunan. *Inovasi*, Vol. 13(1), 61-67.
- Gujarati, D.N., dan Porter, D.C. (2012). *Dasar – Dasar Ekonometrika Buku 2*, Edisi 5, Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Karyadi, S.A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2014. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusnandar, Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Munir, M., dan Mahdar, N.M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*. Vol. 3(2), 30-37.
- Napitu, A.E., Dillak, V.J., dan Kurnia, S.A.B. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2016). *e-Proceeding of Management*, Vol.5(3), 3358-3365.
- Nopiani, N.M., Cipta, W., dan Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *e-Jurnal Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4.
- Nurrachman, G. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Widayatama.

- Palupi, F.A.D., dan Sulardi. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6(1), 40-51.
- Pramudita, T.G. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, Kemiskinan, dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1987-2017. Tesis. Pendidikan Ekonomi Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putong, I. (2009). *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. 3rd Edition, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Putra, F. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2014), *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi*, Vol. 9(2), 91-102.
- Samodra, B. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sarangih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sari, N., Djuanda, G., dan Sarwani. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3(1), 91-100.
- Sari, P., dan Ningsih, N.H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui DAU dan DAK Sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 12(2), 99 – 112.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 14(1), 19-40.
- Sulistiyorini, E. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *Simki-Economic*, Vol. 2(2), 2-8.

- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Tausikal, Askan. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 1
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah atau Desentralisasi Daerah
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007
- Wandira, Arbie Gugugs. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal.
- Wahyuningsih, P., dan Widaryanti. (2015). Peningkatan PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 12(1), 33.48.